

**Model Pembelajaran Pancasila Berbasis *Hybrid Learning*: Studi Kualitatif Tata Kelola dan Pengalaman Belajar Nilai Mahasiswa di Era Digital****Agersi Diah Anggraini**

Teknik Informatika, STMIK Pontianak, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.70115/semesta.v4i2.119>

Article Info	Abstract
Article History Received: April 30, 2026 Accepted: June 4, 2026 Published: July 27, 2026	<i>Pancasila Education in the digital era faces two major challenges: cyber polarization and the increasing adoption of hybrid learning. This critical qualitative case study examines pedagogical governance and the learning experiences of lecturers and students in negotiating Pancasila values within hybrid learning environments supported by a Learning Management System (LMS). Data were collected through in-depth interviews with Generation Z students, lecturers, and academic staff, participatory observation of synchronous and asynchronous learning, and institutional policy document analysis. The findings identify three key issues: (1) administrative technofetishism, where value education is reduced to quantitative LMS indicators; (2) existential alienation, in which limited face-to-face interaction weakens empathy and meaningful value internalization; and (3) ethical schizophrenia, reflected in the gap between normative compliance in LMS activities and students' actual behavior on social media. The study concludes that current hybrid learning promotes superficial internalization of Pancasila values. It recommends reconstructing instructional practices through Value-Based Critical Digital Pedagogy emphasizing dialogic engagement, reflective learning, and authentic ethical assessment.</i>
Keywords Critical digital pedagogy, Hybrid Learning, Pancasila Education, Pedagogical Governance, Ethical Schizophrenia, Learning Management System, Value Internalization.	
Informasi Artikel	Abstrak
Kata kunci Pedagogi digital kritis, Hybrid Learning, Pendidikan Pancasila, Tata Kelola Pedagogis, Schizofrenia Etis	Pendidikan Pancasila di era digital menghadapi dua tantangan utama, yaitu polarisasi siber dan meningkatnya penerapan pembelajaran hibrida. Penelitian ini bertujuan mengkaji tata kelola pedagogis serta pengalaman belajar dosen dan mahasiswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan pembelajaran hibrida berbasis LMS. Desain penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa Generasi Z, dosen, dan tenaga kependidikan, observasi partisipatif pada pembelajaran sinkron dan asinkron, serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu: (1) teknofetisme administratif, yang mereduksi pendidikan nilai menjadi sekadar pemenuhan indikator kuantitatif pada LMS; (2) alienasi eksistensial, akibat berkurangnya interaksi langsung yang melemahkan empati dan proses internalisasi nilai; serta (3) skizofrenia etis, berupa kesenjangan antara kepatuhan terhadap nilai dalam LMS dan perilaku mahasiswa di media sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa internalisasi nilai Pancasila melalui pembelajaran hibrida masih bersifat dangkal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pembelajaran berbasis Pedagogi Digital Kritis Berorientasi Nilai yang menekankan dialog, refleksi, dan evaluasi etis secara autentik.
Corresponding Author Agersi Diah Anggraini Teknik Informatika, STMIK Pontianak, Indonesia Email: diah.anggraini@stmikpontianak.ac.id	

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright ©2026 Agersi Diah Anggraini

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengemban mandat ontologis untuk mentransformasikan nilai-nilai filosofis negara menjadi kesadaran etis serta praksis hidup mahasiswa. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat aturan dan norma yang berfungsi sebagai kompas kehidupan bernegara, sekaligus memanifestasikan dirinya sebagai identitas, kepribadian, dan jiwa bangsa (Resmana & Dewi, 2021). Pada skala nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan fungsi pendidikan nasional dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, meningkatkan kualitas hidup warga negara, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di ranah pendidikan tinggi, Pendidikan Pancasila diimplementasikan sebagai mata kuliah wajib umum bagi seluruh program studi (Widiatmaka & Shofa, 2022). Kehadiran mata kuliah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda (Najicha & Raichanah, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, salah satu orientasi utama pembelajaran ini adalah mengonstruksi kepribadian mahasiswa agar selaras dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga melahirkan warga negara yang baik (*good citizen*) (Bahrudin, 2019). Secara ideal, ruang kelas bukanlah wadah pasif untuk mentransfer pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), melainkan laboratorium emansipatoris tempat habituasi nilai (*value habituation*) dihidupkan melalui proses dialogis, interaktif, dan kontekstual.

Dalam lanskap pendidikan modern, integrasi teknologi melalui pembelajaran bauran (*hybrid learning*) diproyeksikan sebagai jembatan ideal. Pembelajaran hibrida mengombinasikan pelbagai media, teknologi, aktivitas, dan peristiwa belajar demi mengoptimalkan program instruksional (Fauzan & Arifin, 2017). Model ini hadir sebagai solusi inovatif untuk menyelaraskan pedagogi dengan kemajuan teknologi mutakhir (Sitepu et al., 2022). Secara teknis, komposisi model bauran ini bervariasi; mulai dari proporsi seimbang 50/50 antara daring dan luring, hingga formula 75/25 yang mengalokasikan waktu aktivitas virtual secara lebih dominan (Wahyudi & Sabara, 2022). Format ini diharapkan mampu memperluas aksesibilitas tanpa mereduksi kedalaman pertemuan eksistensial antara dosen dan mahasiswa, sekaligus mentransendensikan nilai-nilai Pancasila ke dalam ruang digital Gen Z.

Namun, realitas empiris memperlihatkan diskoneksi yang mengkhawatirkan. Laporan terkini dari Setara Institute dan indikator rujukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga tahun 2026 mengonfirmasi bahwa ruang siber justru mengkristal menjadi medan kontestasi ideologi transnasional dan polarisasi politik akut yang menyasar mahasiswa sebagai konsumen utamanya. Di sisi lain, adopsi *hybrid learning* pasca-pandemi yang terekam dalam statistik pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) nasional kerap terjebak dalam formalitas teknologis. Implementasi LMS di Indonesia menunjukkan kesenjangan lebar antara potensi teknologi dengan pemanfaatan riil di lapangan, di mana mayoritas pendidik sekadar memanfaatkan platform digital untuk mengunggah materi dan tugas tanpa mengeksplorasi fitur interaktifnya (Mahabu et al., 2025).

Evaluasi pembelajaran digital di beberapa universitas mengindikasikan bahwa sintaks pembelajaran bauran didominasi oleh tata kelola administratif seperti presensi daring, pengunggahan dokumen PDF asinkronus, dan kuis pilihan ganda terotomatisasi. Ketika

pembelajaran ideologi dimediasi oleh arsitektur digital yang kaku, distansi sosial dan alienasi nilai tidak dapat dihindarkan. Interaksi afektif-dialogis menyusut menjadi transaksi kognitif yang dangkal. Akibatnya, dosen mengalami disorientasi peran karena kelelahan mengelola infrastruktur teknologi (*content administrator*), sementara mahasiswa didera kejenuhan digital (*zoom fatigue*) yang mereduksi internalisasi nilai menjadi sekadar pemenuhan beban SKS. Pengalaman belajar mahasiswa dalam mengontekstualisasikan Pancasila menjadi terfragmentasi; mereka fasih menghafal butir nilai di layar gawai, namun gagap mengartikulasikannya dalam realitas sosial yang terpolarisasi. Masalah substantifnya bukan lagi soal keterbatasan gawai atau instabilitas sinyal, melainkan absennya pedagogi nilai yang adaptif dalam tata kelola hibrida tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai model bauran secara masif didominasi oleh pendekatan kuantitatif-positivistik yang berfokus pada meta-analisis efektivitas platform, kepuasan teknis pengguna, atau korelasi adopsi LMS dengan hasil belajar kognitif. Sebagai contoh, studi M. Asyrofi dan Iwan Junaedi (2022) membuktikan bahwa kualitas pembelajaran hibrida berbasis konstruktivisme tergolong baik dan mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis mahasiswa secara signifikan dibanding kelas kontrol. Serupa dengan itu, riset Dyah Ayu Puspitorini et al. (2020) melalui uji-t *posttest* dan *N-gain* menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0,05$) pada hasil belajar, serta menemukan korelasi kuat ($r = 0,83$) antara capaian kognitif dengan keterampilan metakognitif, sehingga merekomendasikan *hybrid learning* sebagai alternatif mengatasi keterbatasan tatap muka.

Sebaliknya, literatur mengenai Pendidikan Pancasila umumnya masih tertahan pada koridor konseptual-normatif yang membahas urgensi ideologi nasional atau analisis konten kurikulum tanpa memotret bagaimana nilai tersebut dinegosiasikan di ruang digital. Kesenjangan substantif inilah yang dibidik oleh penelitian ini, yakni absennya analisis kritis terhadap dimensi intersubjektivitas dan tata kelola pedagogi nilai dalam ruang hibrida. Penelitian ini melangkah melampaui dikotomi teknis (luring vs daring) dengan membedah bagaimana aspek sosiologis teknologi memengaruhi habituasi etis. Posisi akademik penelitian ini secara tegas menolak reduksionisme teknologi yang menganggap platform digital bersifat netral. Sebaliknya, penelitian ini mengajukan tesis bahwa arsitektur digital *hybrid learning* membawa bias tata kelola tertentu yang jika tidak diintervensi secara kritis, justru akan mendegradasi sifat emansipatoris dari pendidikan nilai itu sendiri.

Berdasarkan dinamika problematik di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi kedalaman makna dan relasi kuasa dalam tata kelola pembelajaran. Masalah utama dirumuskan dalam satu pertanyaan kunci: bagaimana model pembelajaran Pancasila berbasis *hybrid learning* dikelola dan dimaknai secara eksistensial dalam pengalaman belajar nilai mahasiswa di tengah desakan era digital? Secara spesifik, masalah tersebut diturunkan ke dalam tiga fokus amatan: Struktur tata kelola pedagogis (perencanaan, interaksi arsitektur digital, dan evaluasi afektif) dalam model *hybrid learning*. Cara mahasiswa dan dosen menegosiasikan serta memaknai perjumpaan nilai Pancasila di dalam ruang bauran (hibrida). Akar penyebab terjadinya ketegangan antara formalitas administratif teknologi dengan kedalaman internalisasi nilai.

Penelitian ini memiliki urgensi ilmiah yang mendesak karena perguruan tinggi saat ini sedang berada di persimpangan jalan digitalisasi. Tanpa adanya kajian kualitatif kritis, institusi

pendidikan tinggi berisiko melahirkan generasi yang melek digital secara teknis namun mengalami kelumpuhan etis serta disintegrasi nilai. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan merumuskan kembali model pembelajaran Pancasila berbasis *hybrid learning* melalui lensa kualitatif kritis.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) pada pengembangan ilmu pembelajaran bauran, khususnya dalam sub-bidang *Critical Digital Pedagogy* (Pedagogi Digital Kritis) yang dikontekstualisasikan pada pendidikan nilai di negara berkembang. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan cetak biru (*blueprint*) bagi pengambil kebijakan kampus dalam merancang tata kelola hibrida yang berbasis interaksi afektif, sekaligus menjadi panduan reflektif bagi dosen untuk mendesain sintaks pembelajaran bauran yang memicu dialog mendalam (tidak sekadar memindahkan teks ke layar), sehingga mahasiswa mendapatkan kembali hakikat ruang kelas sebagai ruang aman untuk mengontekstualisasikan nilai Pancasila dalam realitas keseharian mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus Kualitatif Kritis (*Critical Qualitative Case Study*). Pendekatan studi kasus digunakan agar peneliti dapat menggali data secara lebih komprehensif dan mendalam (Parnawi, A. 2023). Secara epistemologis, pendekatan ini berakar pada paradigma kritis yang memandang bahwa realitas sosial dalam hal ini tata kelola *hybrid learning* tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh kontradiksi struktural, relasi kuasa administratif, dan bias teknologis yang mengondisikan kesadaran aktor. Studi kasus diterapkan karena fenomena yang diteliti merupakan sebuah "sistem terbatas" (*bounded system*), yakni praktik spesifik mata kuliah Pendidikan Pancasila bauran pada lingkungan pendidikan tinggi, yang diamati dalam konteks kehidupan nyata tempat batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara tegas. Melalui lensa epistemologis ini, teknologi hybrid tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai alat (*tool*) netral, melainkan sebagai ruang diskursif yang mengondisikan, membatasi, atau mendegradasi makna etis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menembus deskripsi superfisial di permukaan menuju pembongkaran hambatan sosiologis tentang mengapa ketegangan antara formalitas administratif teknologis dan kedalaman internalisasi nilai dapat terus diproduksi secara sistemik.

Konteks penelitian ini ditetapkan secara *purposive* pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang telah mengintegrasikan *Learning Management System* (LMS) secara institusional pasca-pandemi, serta memiliki karakteristik kedinamisan sosiopolitik yang tinggi di kalangan mahasiswanya. Strategi pemilihan informan menerapkan teknik *Purposive Sampling* yang dikombinasikan dengan kriteria berbasis kekayaan informasi demi menjamin kedalaman data eksistensial. Informan penelitian dikategorikan ke dalam tiga kelompok aktor kunci, yaitu: 1) Informan utama, yang terdiri dari mahasiswa aktif dari Generasi Z yang sedang atau telah menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Pancasila bauran, dengan variasi keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan atau aktivitas ruang publik digital guna menangkap keberagaman artikulasi nilai; 2) Informan akademik, yakni dosen-dosen pengampu Pendidikan Pancasila yang memiliki intensitas adopsi teknologi bauran yang tinggi dan mengalami transisi tata kelola dari model konvensional ke digital; serta 3) Informan

struktural, yaitu pengembang kurikulum atau pengelola lembaga pembelajaran universitas yang bertanggung jawab atas desain arsitektur LMS dan penentuan regulasi teknis pembelajaran digital.

Pengumpulan data dilakukan secara multidimensional melalui tiga teknik utama yang saling mengonfirmasi, dengan prosedur yang ketat. Pertama, *wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan yang berorientasi pada pelacakan pemaknaan eksistensial subjek, fenomena "kelelahan digital" (*zoom fatigue*), serta proses negosiasi nilai. Wawancara diselenggarakan baik secara luring maupun daring demi mereplikasi sifat ruang antara (hibrida) yang dirasakan aktor. Kedua, observasi partisipatif pasif dilaksanakan dengan masuk secara langsung ke dalam ruang-ruang kelas hybrid, meliputi ruang fisik tatap muka, ruang virtual sinkronus (platform konferensi video), dan ruang asinkronus (aktivitas pada LMS). Fokus pengamatan diarahkan pada dinamika interaksi afektif, gaya komunikasi pedagogis dosen, serta sejauh mana fitur teknologi membatasi dialog emansipatoris. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa cetak biru (*blueprint*) kebijakan digitalisasi kampus, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), modul ajar digital, serta jejak digital (digital footprints) berupa log diskusi asinkronus di LMS untuk memetakan aturan administratif yang berlaku.

Analisis data dijalankan secara sirkular dan interaktif mengikuti logika analitis kualitatif kritis melalui tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi dan kondensasi data, di mana rekaman wawancara ditranskripsikan secara verbatim, catatan lapangan diorganisasikan, dan dokumen dipilah untuk mengeliminasi informasi yang tidak memiliki bobot argumentatif tanpa mereduksi keaslian konteks. Tahap kedua adalah kategorisasi dan pengodean, yang dimulai dari pengodean terbuka untuk membedah data mentah, dilanjutkan dengan pengodean aksial guna mengonseptualisasikan kode-kode tersebut ke dalam kategori kritis (seperti kelelahan administratif dosen, Alienasi Nilai Mahasiswa dan lain-lain). Tahap ketiga adalah penarikan makna dan abduksi, yakni menghubungkan kategori-kategori konseptual dengan teori *Critical Digital Pedagogy* untuk melahirkan pemahaman mendalam mengenai struktur yang mendistorsi pengalaman belajar nilai di ruang hibrida.

Untuk menjamin akuntabilitas metodologis dan kualitas ilmiah, strategi keabsahan data (trustworthiness) ditegakkan melalui tiga pilar utama. Triangulasi diterapkan baik sebagai triangulasi sumber (membandingkan perspektif mahasiswa, dosen, dan pembuat kebijakan) maupun triangulasi teknik (mengonfrontasi hasil wawancara dengan bukti empiris hasil observasi LMS dan dokumen RPS). Member checking* dilakukan dengan mengembalikan draf transkrip wawancara atau hasil rekonstruksi makna kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi kritis peneliti tetap setia pada intensi pengalaman asli informan. Terakhir, aspek dependabilitas dipenuhi dengan menyediakan rekam jejak audit yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup seluruh tahapan penarikan keputusan konseptual, catatan lapangan mentah, hingga evolusi bagan pengodean, sehingga keseluruhan alur logika penarikan kesimpulan riset dapat dilacak dan diuji secara objektif oleh peninjau eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Analisis data kualitatif kritis terhadap praktik mata kuliah Pendidikan Pancasila berbasis *hybrid learning* memunculkan tiga tema utama yang mendeskripsikan ketegangan struktural antara sistem administrasi digital dan kedalaman pengalaman belajar nilai para aktor di lapangan.

1. Teknofetisisme Administratif: Reduksi Tata Kelola Pedagogis Menjadi Metrik Digital:

Struktur tata kelola pembelajaran hybrid di lapangan menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang masif dari esensi pedagogi nilai menuju pemenuhan metrik digital yang mekanistik. Regulasi tata kelola yang dirancang oleh pengelola universitas menuntut dosen dan mahasiswa memprioritaskan indikator kuantitatif yang terekam oleh algoritma *Learning Management System* (LMS). Akibatnya, aktivitas esensial seperti refleksi moral dan diskusi nilai menyusut menjadi formalitas pengisian kolom komentar demi memenuhi persentase keaktifan sistem. Ketegangan ini dirasakan secara langsung oleh para dosen pengampu yang terjebak dalam disorientasi peran, dari seorang pendidik nilai menjadi administrator data digital. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh dosen pengampu:

"Waktu saya habis bukan untuk memikirkan bagaimana mahasiswa menginternalisasi nilai keadilan sosial, tapi untuk memastikan sistem membaca bahwa saya sudah mengunggah modul sebelum jam tujuh pagi, mencentang presensi manual yang tenggat waktunya otomatis, dan menilai ratusan kuis pilihan ganda. Kami kelelahan secara administratif di depan layar. Pancasila yang seharusnya hidup lewat keteladanan dan diskusi intim, kini ringkas menjadi deretan diagram batang pemenuhan log-in di akun kedeputian akademik."

Di sisi mahasiswa, struktur tata kelola yang kaku ini melahirkan respons pragmatis yang mengabaikan kedalaman pemaknaan. Proses pengerjaan tugas-tugas nilai dalam LMS dimaknai sebatas kewajiban menggugurkan beban sistem. Informan mahasiswa mengonfirmasi realitas tersebut:

"Kami tahu cara 'mengakali' algoritma LMS kampus. Supaya keaktifan dinilai 100%, kami cukup menyalin-tempel teks dari dokumen PDF yang diunggah dosen, mengubah beberapa kata lewat aplikasi, lalu menaruhnya di kolom diskusi asinkronus tepat waktu. Tidak ada dialog yang benar-benar hidup. Kami tidak membaca esai teman, kami hanya mengejar centang hijau di sistem agar tidak dianggap alfa oleh sistem universitas."

2. Ruang Antara (Hibrida) dan Alienasi Eksistensial Perjumpaan Nilai.

Ketika mahasiswa dan dosen menegosiasikan perjumpaan mereka di "ruang antara" sebuah wilayah hibrida yang menjembatani kehadiran fisik dan virtual mediasi layar digital dalam interaksi sinkronus justru memproduksi distansi sosial dan alienasi eksistensial. Kehadiran aktor terfragmentasi menjadi kotak-kotak visual yang mati, sehingga memotong arus empati dan keterikatan emosional yang menjadi prasyarat utama dalam pendidikan nilai. Fenomena mematikan kamera (off-camera) selama perkuliahan daring menjadi bentuk penarikan diri subjek dari ruang belajar yang tidak intim. Mahasiswa lainnya: "Ketika dosen berbicara tentang persatuan atau kemanusiaan lewat layar Zoom sementara kamera kami semua mati, ruang itu terasa sangat sepi dan asing. Saya berada di kamar sendiri, menatap layar yang isinya kotak-kotak hitam dengan nama. Tidak ada rasa bahwa kami sedang bersama-sama

mengkaji dasar negara. Pancasila terasa seperti benda mati yang melayang di internet. Saya merasa terasing, baik dari dosen maupun dari teman sekelas."

Dosen pun mengalami kesulitan dalam menangkap respons afektif mahasiswa ketika dialog dimediasi oleh sekat-sekat digital. Kehilangan kontak mata dan kegagalan membaca bahasa tubuh mahasiswa membuat pesan-pesan nilai kehilangan resonansinya seperti yang dikeluhkan oleh dosen lain. "Berbicara di depan beberapa kotak hitam tanpa wajah itu seperti berbicara dengan dinding. Dalam kuliah konvensional, saya bisa melihat mata mereka yang berbinar atau mengantuk ketika kita mendiskusikan isu kemiskinan dalam konteks Sila Kelima. Di ruang hybrid ini, energi afektif itu menguap. Saya kehilangan instrumen untuk mengukur apakah nilai tersebut menyentuh hati mereka atau hanya lewat begitu saja di pelantang telinga mereka."

3. Komparasi Semu: Fragmentasi Pengalaman Belajar dan Ketegangan Internalisasi Nilai

Tema ketiga mengungkap adanya jurang pemisah antara kemajuan teknis platform dengan kedalaman internalisasi nilai. Dalam ruang hybrid, pengalaman belajar nilai mahasiswa menjadi terfragmentasi. Terjadi disosiasi di mana mahasiswa mampu menguasai pengetahuan Pancasila secara kognitif-digital, namun gagap dan mengalami disorientasi etis ketika harus mengartikulasikannya dalam realitas sosial yang konkret di era digital. Mahasiswa mengalami pembelahan karakter antara apa yang mereka tampilkan di dalam penugasan resmi LMS dengan bagaimana mereka bersikap di ruang publik digital (seperti media sosial). Informan mahasiswa lain mengekspresikan ketegangan personal ini: "Di LMS, untuk mendapatkan nilai A, saya menulis esai yang sangat normatif tentang toleransi dan pentingnya menghargai perbedaan sesuai Sila Ketiga. Namun, begitu keluar dari LMS dan masuk ke X atau Instagram, saya kembali ikut dalam arus polarisasi, mencaci kelompok yang beda pilihan politik, dan menggunakan kata-kata kasar. Ada batasan tegas

Ketegangan substantif ini berakar dari absennya ruang aman yang difasilitasi oleh arsitektur teknologi untuk mengakomodasi keraguan, kritik, dan negosiasi jujur mahasiswa terhadap realitas ideologis di sekitarnya. Pengalaman belajar bauran yang ada saat ini sekadar memindahkan teks-teks doktrinal dari buku cetak ke layar gawai, tanpa mengubah cara nilai tersebut didialogkan secara kritis. Akibatnya, internalisasi nilai yang terjadi bersifat semu; ia terekam baik dalam basis data universitas, namun mandul dalam memandu praksis hidup mahasiswa di tengah derasny arus digitalisasi.

B. Pembahasan

Kritik mendasar terhadap temuan penelitian di atas memperlihatkan bahwa implementasi *hybrid learning* dalam Pendidikan Pancasila telah mengalami devaluasi esensi, di mana efisiensi teknologis mengalahkan tujuan emansipatoris pendidikan nilai. Bagian ini mendiskusikan temuan tersebut dengan mengaitkannya pada tatanan teoretis dan literatur mutakhir.

1. Teknofetisme dan Komodifikasi Administratif

Temuan mengenai reduksi tata kelola menjadi metrik digital menguatkan sekaligus memperluas kritik dalam Critical Digital Pedagogy. Pengondisian arsitektur LMS yang memaksa dosen dan mahasiswa berinteraksi secara mekanistik merupakan bentuk nyata dari

apa yang disebut sebagai dehumanisasi digital. Ketika universitas mematok keberhasilan pembelajaran nilai dari metrik log-in, durasi mengunduh dokumen, dan keteraturan submit tugas, lembaga tersebut terjebak dalam "teknofetisisme" sebuah keyakinan semu bahwa alat digital secara otomatis menjamin kualitas transfer nilai. Fenomena ini mengkritisi asumsi optimistik dari literatur adopsi teknologi arus utama (pasca-2020) yang cenderung mengagungkan hybrid learning sebagai solusi mutlak fleksibilitas instruksional. Riset ini membuktikan bahwa fleksibilitas tersebut bersifat ilusif; ia mengorbankan ruang reflektif yang membutuhkan keheningan dan kedalaman berpikir demi mengejar kepatuhan algoritma sistem yang positivistik.

2. Alienasi Ruang Antara dan Kebutuhan Intersubjektivitas

Kondisi "kotak hitam tanpa wajah" dan kelelahan afektif yang dialami dosen serta mahasiswa di ruang antara (hibrida) memperluas teori intersubjektivitas dalam ruang siber. Pembelajaran nilai membutuhkan apa yang disebut perjumpaan eksistensial yang intim. Ketika teknologi memediasi interaksi dengan menghilangkan dimensi kehadiran tubuh fisik tanpa adanya rekayasa sintaks digital yang humanis, empati sosial akan menguap. Hal ini menjelaskan mengapa literatur normatif Pendidikan Pancasila selama ini gagal menjawab tantangan zaman, karena mereka berasumsi nilai dapat ditransfer seperti komoditas kognitif biasa. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ruang hibrida yang tidak dikelola secara kritis justru memproduksi alienasi eksistensial, di mana mahasiswa merasa terputus dari realitas kemanusiaan yang sedang mereka pelajari.

3. Schizofrenia Etis Generasi Digital

Ketegangan yang diungkapkan oleh informan mengenai pembelahan karakter antara formalitas di LMS kampus dan anarki etis di media sosial) menunjukkan fenomena schizofrenia etis yang akut. Hal ini memperluas diskursus mengenai literasi digital sipil (*digital citizenship*). Pancasila dalam ruang hybrid yang kaku telah tereduksi menjadi sekadar "bahasa asing" yang harus dikuasai mahasiswa untuk lulus ujian, bukan sebagai panduan moral hidup.

Konsekuensinya, terjadi fragmentasi kesadaran. Penelitian ini mengoreksi simplifikasi penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan literasi digital kognitif mahasiswa berbanding lurus dengan kecakapan etis digital mereka. Bukti empiris penelitian ini menolak hal tersebut: mahasiswa mampu meraih nilai kognitif sempurna di LMS sembari tetap bertindak destruktif di ruang digital nyata akibat absennya internalisasi nilai secara substantif (*substantive value internalization*).

Model pembelajaran Pancasila berbasis *hybrid learning* yang dipraktikkan saat ini terjebak dalam krisis tata kelola teknofetisisme, di mana arsitektur digital mereduksi proses habituasi nilai yang emansipatoris menjadi transaksi administratif kuantitatif. Ruang bauran yang tercipta justru memproduksi alienasi eksistensial dan fragmentasi karakter pada diri mahasiswa. Mahasiswa mengalami pembelahan identitas (schizofrenia etis) akibat dari kegagalan sistem dalam menyediakan ruang dialog yang aman, kritis, dan intersubjektif, sehingga internalisasi nilai Pancasila yang dihasilkan bersifat semu subur dalam basis data performa universitas namun mandul dalam praksis kehidupan digital yang nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitatif kritis terhadap Model Pembelajaran Pancasila Berbasis Hybrid Learning, kesimpulan substantif penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga poin inti berikut: Reduksi Tata Kelola Menjadi Teknofetisisme Administratif Implementasi hybrid learning pada mata kuliah Pendidikan Pancasila mengalami devaluasi esensi akibat tata kelola yang bias teknofetisisme. Learning Management System (LMS) kampus mereduksi proses habituasi nilai yang emansipatoris menjadi sekadar transaksi administratif mekanistik. Keberhasilan pembelajaran diukur secara artifisial melalui metrik kuantitatif algoritma (seperti durasi log-in, ketepatan waktu unggah dokumen, dan pemenuhan kuota komentar), sehingga mengubah peran dosen menjadi administrator data digital dan memaksa mahasiswa merespons pembelajaran secara pragmatis demi formalitas kelulusan.

Alienasi Eksistensial di Ruang Antara (Hibrida): ediasi layar digital dalam interaksi sinkronus gagal membangun keintiman intersubjektif yang menjadi prasyarat utama pendidikan nilai. Ruang bauran (hybrid) justru memproduksi distansi sosial dan alienasi eksistensial. Fenomena mematikan kamera (off-cam) dan tiadanya kontak mata memotong arus empati sosial, sehingga pesan-pesan moral Pancasila kehilangan resonansi afektifnya dan terasa sebagai komoditas kognitif yang asing serta mengambang di ruang siber.

Pembelahan Karakter (Schizofrenia Etis) Mahasiswa: Terjadi fragmentasi dalam pengalaman belajar nilai mahasiswa, yang melahirkan kondisi schizofrenia etis. Terdapat jurang pemisah yang lebar antara performa kognitif digital mahasiswa di dalam LMS (yang mampu menyusun narasi nilai secara normatif sempurna demi mengejar nilai akademik) dengan praksis perilaku nyata mereka di ruang publik digital yang tetap rentan terjebak dalam arus polarisasi dan anarki etis.

Internalisasi nilai pancasila yang dihasilkan oleh model hybrid learning saat ini bersifat semu. Model ini terbukti subur dan rapi dalam basis data performa birokrasi universitas, namun mandul dalam mengondisikan kesadaran etis dan memandu praksis hidup mahasiswa di tengah derasnya arus realitas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyrofi, M. A. M., & Junaedi, I. (2016). Kemampuan representasi matematis ditinjau dari multiple intelligence pada pembelajaran hybrid learning berbasis konstruktivisme. *Unnes Journal of Mathematics Education Research*, 5(1), 32-39.
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184- 200.
<https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- Fauzan, F. A., & Arifin, F. (2017). Hybrid learning sebagai alternatif model pembelajaran. In *Seminar nasional profesionalisme guru di era digital* (pp. 247-252).
- Mahabu, F. F., Subhan, M., Pramadita, O. I., Fahriza, A., & Ekabudi, A. (2025). Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 3(1), 27-34.

- Najicha, F. U., & Raichanah, N. (2023). Peran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dalam menghadapi hoax. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 122-128. <https://doi.org/10.33061/jgz.v12i2.9940>
- Parnawi, A. (2023). Penerapan metode konstruktivisme dalam Pendidikan Agama Islam untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis dan religiussiswa. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(04).
- Puspitorini, D. A., Indriyanti, D. R., Pribadi, T. A., & Hardiyanti, L. N. (2020). Peningkatan hasil belajar kognitif melalui pembelajaran tpsw berbasis hybrid-learning materi sistem sirkulasi. *Bioma: Jurnal Ilmiah Biologi*, 9(1), 41-53.
- Resmana, M. T., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Pancasila untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(2), 473-485.
- Sitepu, S. V., Sijabat, O. P., Naibaho, T., & Simanjuntak, R. M. (2022). Evaluasi psikomotorik dalam pembelajaran matematika berbasis hybrid learning. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 2(2), 251-267. <https://doi.org/10.46229/elia.v2i2.487>
- Wahyudi, W., & Sabara, E. (2022). Desain dan implementasi media pembelajaran mikrokontroler berbasis hybrid learning menggunakan wokwi simulation. *Jurnal Media Elektrik*, 19(3), 186- 193. <https://doi.org/10.59562/metrik.v19i3.5473>
- Widiatmaka, P., & Shofa, A. M. A. (2022). Strategi mata kuliah pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter nasionalisme mahasiswa di era Society 5.0. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.21595>